



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**

LEMBAGA : **PD JOGJATAMA VISHESHA**

UNIT KERJA : **DIREKSI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD VERGA PRABOWO AGUS**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **411883**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.810.000.000**

1. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG ,
WARISAN Rp. 290.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/146 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/50 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp.
680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **255.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
4. MOTOR, SUZUKI GSX-R 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
16.500.000
5. MOBIL, SUZUKI IGNIS TM2FX (4X2) M/T/ Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **330.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	422.022.811
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.817.522.811
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.817.522.811

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.